

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, mengatakan bahwa:
“Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Mahmudi (2016:29), menyatakan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintah mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana melaporkannya”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman/ prinsip yang dibuat oleh pemerintah tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, guna menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2.1.2 Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam

pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip standar akuntansi pemerintahan terdiri dari delapan yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Suatu laporan keuangan dengan adanya prinsip ini wajib membuat laporan keuangan sesuai dengan delapan prinsip di atas.

Tujuan prinsip ini adalah sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, mendefinisikan bahwa:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Mahmudi (2016: 20) menyatakan bahwa:

Sitem Pengendalian Intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat/daerah untuk melindungi harta dan kekayaan daerah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan untuk di ikuti dan dijalankan oleh seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

2.1.4 Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, mendefinisikan bahwa:

1. Lingkungan pengendalian
Unsur sistem pengendalian intern yang pertama adalah lingkungan pengendalian.
Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Kepemimpinan yang kondusif
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
2. Penilaian Risiko
Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan.
 - a. Identifikasi risiko
 - b. Analisis risiko
3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.
 - a. Pengendalian Fisik Aset
 - b. Pencatatan dan Dokumentasi
4. Informasi dan Komunikasi
Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.
 - a. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
 - b. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pimpinan dan pegawai organisasi wajib menjalankan unsur-unsur sistem pengendalian intern hal ini untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi dan melindungi aset daerah/negara dari tindakan yang di timbulkan khususnya dari intern organisasi itu sendiri.

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan

Abdul Hafiz Tanjung (2010:13), menyatakan bahwa:

“Kualitas laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Berdasarkan pengertian kualitas laporan keuangan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa laporan keuangan itu berkualitas jika memenuhi seluruh unsur, prinsip dan standar yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan proses/tata cara membuat dan menyajikan laporan keuangan.

2.1.6 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016: 11-12) menyatakan bahwa:

Laporan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri – ciri atau karakteristik berikut ini:

- a. Relevan. Artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.
- b. Andal (*reliability*). Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi.

- c. Dapat dibandingkan (*comparability*). Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
- d. Dapat dipahami (*understandability*). Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh pihak – pihak pengguna laporan keuangan.

Sedangkan menurut PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan *relevan* apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu.
 - a) Memiliki umpan balik
 - b) Manfaat prediktif
 - c) Tepat waktu
 - d) Lengkap
2. Andal
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
 - a) Penyajian yang jujur
 - b) Dapat diverifikasi
 - c) Netralitas
3. Dapat dibandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan.
 - a) Konsisten penerapan kebijakan akuntansi.
 - b) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
4. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.
 - a) Bentuk informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan berkualitas jika memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Ini berarti laporan keuangan tersebut mudah

dimengerti oleh para pengguna dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.7 Kompetensi Sumber Daya manusia

2.1.7.1 Pengertian Kompetensi

Manurut Suparno (2012:27), menyatakan bahwa:

“Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan”.

Sedangkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, mendefinisikan bahwa:

“Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003, menyatakan bahwa:

“Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien”.

Berdasarkan penjelasan diatas, kompetensi adalah keahlian atau keterampilan, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang agar profesional dan berintegritas sehingga tujuan organisasi tercapai.

2.1.7.2 Pengertian Sumber Daya Manusia

Manurut Sutadji (2010), menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting menentukan dalam setiap organisasi karena sebagai salah satu unsur kekuatan daya saing organisasi juga sebagai penentu utama organisasi dalam meningkatkan produknya atau pelayanannya kepada masyarakat”.

Sedangkan menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, mendefinisikan bahwa:

“Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan”.

Berdasarkan pengertian diatas, sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi itu sendiri dan mutlak harus dimiliki oleh organisasi instansi atau perusahaan.

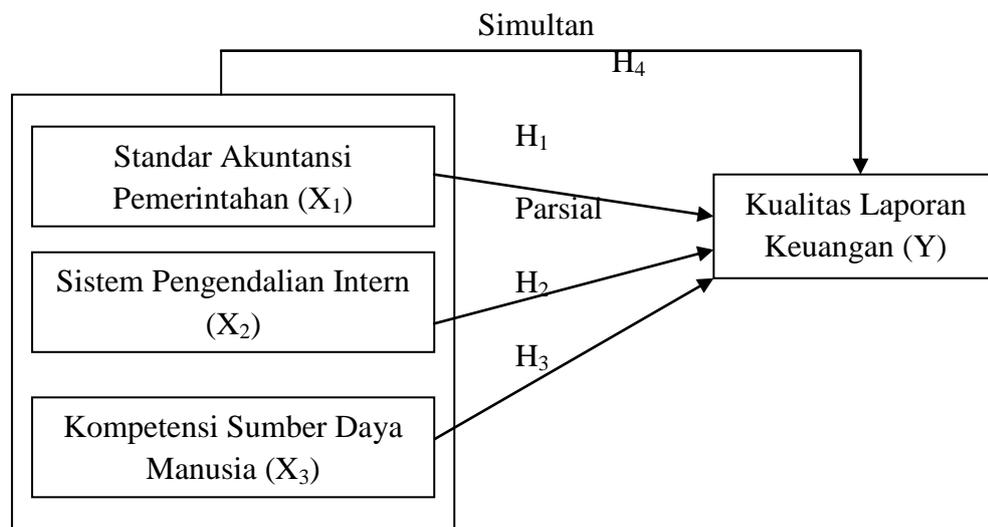
2.1.7.3 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan “kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik dari pendidikan dan pelatihan formal dan non formal guna menunjang pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

“Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian”. (Wahono, S, 2012, *Kiat Menyusun Kerangka Pemikiran*, <http://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/>, diakses tanggal 24 Mei 2017). Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.2.1
Kerangka Pemikiran

Adapun penjelasan dari gambar kerangka pemikiran diatas yaitu:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel – variabel *independen* baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan atau variabel *dependen*.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman/ prinsip yang dibuat oleh pemerintah tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, guna menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Komarudin (2014) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan keuangan berkualitas.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat/daerah untuk melindungi harta dan kekayaan daerah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan untuk di ikuti dan dijalankan oleh seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komarudin (2014) menyebutkan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern telah diterapkan sehingga aturan-aturan mengenai pengendalian dan wewenang atau tanggungjawab secara sistem dapat meningkatkan efektivitas dan ketelitian terhadap pendokumentasian data-data aset Pemerintah.

Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti dkk (2014) menyatakan juga Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:
H2: Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.3.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik dari pendidikan dan pelatihan formal dan non formal guna menunjang pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dkk (2017) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Udiyanti dkk (2014) dari hasil penelitian yang dilakukannya juga menyatakan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini berarti dengan Kompetensi Staf Akuntansi yang baik, maka Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah akan semakin membaik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.3.4 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Udayanti dkk (2014) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi maka Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H4: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 2.4.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1. Yusup Komarudin, 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi	1. Variabel independen dan variabel dependen sama, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1), Sistem Pengendalian Intern (X_2) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Variabel yang digunakan hanya tiga variabel sedangkan peneliti empat variabel. 2. Jumlah sampel 3. Lokasi dan tempat waktu penelitian.	1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukkan bahwa Standar

<p>Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung), http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6485</p>	<p>2. Teknik analisis sama menggunakan analisis regresi linier berganda.</p>		<p>Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan keuangan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas yang bertanggungjawab khususnya pada bidang keuangan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PP No. 71 tahun 2010.</p> <p>2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan</p>
--	--	--	--

			<p>Keuangan, hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern telah diterapkan sehingga aturan-aturan mengenai pengendalian dan wewenang atau tanggungjawab secara sistem dapat meningkatkan efektivitas dan ketelitian terhadap pendokumentasian data-data aset Pemerintah Kota Bandung. Sistem Pengendalian Intern pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Sistem Pengendalian Intern belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas/pejabat yang bertanggungjawab belum menerapkannya secara maksimal</p>
--	--	--	---

			sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008.
2. Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng), https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2978	1. Variabel independen X_1 dan X_2 nya sama. 2. Teknik analisis sama menggunakan analisis regresi linier berganda.	1. Lokasi dan tempat waktu penelitian. 2. Jumlah sampel.	Pertama, Standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Kedua, Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Ketiga, Kompetensi staf akuntansi memiliki

			<p>pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki staf akuntansi, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng.</p> <p>Keempat, Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng.</p>
--	--	--	--

<p>3. Nugraeni dan M. Budiantara, 2015. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja, https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/download/376/711</p>	<p>Variabel independen dan dependen sama yaitu standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan.</p>	<p>1. Teknik uji hipotesis yang digunakan. 2. Lokasi dan tempat waktu penelitian.</p>	<p>Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja secara langsung, sedang kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Standar akuntansi pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan.</p>
<p>4. Anggara Dwi Permadi, 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Bina Marga di Kota Bandung Tahun 2013), repository.widyatama.ac.id/xmlui/b</p>	<p>Variabel independen dan dependen sama yaitu standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan.</p>	<p>1. Alat uji hipotesis yang digunakan. 2. Lokasi dan tempat waktu penelitian.</p>	<p>Berdasarkan indikator penerapan sistem akuntansi pemerintah di Dinas Bina Marga di Kota Bandung Sangat Baik dilihat dari jawaban responden, sedangkan berdasarkan koefisien korelasi <i>rank spearman</i> sedang. Secara keseluruhan penerapan SAP terhadap Kualitas</p>

itstream/handle/123456789/2327/0109432.pdf?			Laporan Keuangan berpengaruh.
5. Sagung Inten Evicahyani dan Nyoman Djinar Setiawina, 2016. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.3 (2016) : 403-428	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel yang digunakan sama yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan. 2. Data yang digunakan yaitu data primer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya variabel intervening. 2. Analisis yang digunakan, yaitu <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) <i>Partial Least Square</i> (PLS) 3. Lokasi dan tempat waktu penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. 2. Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. 3. Pemanfaatan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. 4. Penerapan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. 5. Ada pengaruh tidak langsung kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan yang dimediasi oleh penerapan SPIP.

			<p>6. Ada Pengaruh tidak langsung penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan yang dimediasi oleh penerapan SPIP.</p> <p>7. Ada Pengaruh tidak langsung pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan yang dimediasi oleh penerapan SPIP.</p>
<p>6. M. Ali Fikri Biana Adha Inapty dan RR. Sri Pancawati Martiningsih, 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190</p>	<p>1. Variabel yang digunakan sama yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan.</p> <p>2. Data yang digunakan yaitu data primer.</p>	<p>1. Adanya variabel moderating.</p> <p>2. Lokasi dan tempat waktu penelitian.</p>	<p>Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.</p>
<p>7. Komang Agus Sadu Wibawa, Ni Kadek Sinarwati dan Gede Adi Yuniarta, 2017. Faktor – Faktor yang</p>	<p>1. variabel yang digunakan sama yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian</p>	<p>1. Variabel yang digunakan.</p> <p>2. Jumlah sampel.</p> <p>3. Lokasi dan tempat waktu penelitian.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan (1) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan</p>

<p>Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng, e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No: 8 Tahun 2017)</p>	<p>Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan. 2. Data yang digunakan juga sama yaitu data primer berupa kuesioner. 3. Analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linier berganda.</p>		<p>keuangan, (2) pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (3) penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (4) pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (5) penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan (6) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
<p>8. Tantriani Sukmaningrum, 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah</p>	<p>1. Data primer 2. Analisis regresi</p>	<p>1. Tempat penelitian 2. Analisis yang digunakan beragam.</p>	<p>Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak</p>

Kabupaten dan Kota Semarang)			<p>signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik.</p>
------------------------------	--	--	---

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2017